

MANAJEMEN SITUS PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Hayati Noor¹, Fitria²

Fakultas Teknologi Informasi Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Banjarmasin¹

Program Studi Teknik Informatika Politeknik Hasnur²
email: adhienk.athie@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju akhir-akhir ini memerlukan perhatian yang lebih dari pemerintah provinsi. Melihat betapa pentingnya bidang komunikasi terutama untuk menyampaikan informasi, Internet adalah penyalur yang tepat untuk memberikan kemudahan memperoleh informasi yang mutakhir dan dapat diakses oleh masyarakat publik. Gagasan untuk membuat situs pemprov (pemerintah provinsi) adalah suatu terobosan karena menyadari bahwa masyarakat publik memerlukan informasi tentang pemerintah daerah dan tentang daerahnya sendiri yang dapat diakses dengan mudah. Situs pemerintah provinsi sebagai sumber daya jelas memiliki masalah yaitu ada data yang kurang mutakhir dan juga ada file yang kosong. Selain itu, beberapa artikel yang diterbitkan tidak cukup menarik perhatian karena tidak disajikan secara menarik.

Dengan adanya situs pemerintah provinsi juga diharapkan agar terjadi sinergi yang baik antara stakeholders yang ada dan diharapkan masyarakat dapat menggunakan secara optimal.

Kata Kunci : manajemen situs, e-Government

PENDAHULUAN

Pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia yang meliputi segala aspek kehidupan merupakan upaya untuk mencapai tujuan yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mengisi kemerdekaan bangsa.

Tentunya amat sukar dibayangkan, bagaimana jadinya bila pembangunan nasional dan pembangunan daerah yang tengah dilaksanakan dewasa ini tidak ditunjang oleh komunikasi dan teknologi komunikasi. Perjalanan pembangunan bangsa akan terasa lamban, yang berarti kemakmuran sebagai akhir pembangunan yang didambakan tak akan kunjung menjadi kenyataan. Oleh karena itu bidang komunikasi sangat berperan penting dalam usaha mencapai pembangunan nasional yang direncanakan secara bertahap, berkesinambungan, berdayaguna, dan berhasilguna serta mewujudkan

pemerintahan yang baik (*good governance*) terutama dalam pelayanan publik

Program-program pembangunan serta hasil-hasilnya yang sudah dicapai harus diketahui dan dirasakan langsung dan transparan oleh masyarakat agar nantinya mereka lebih terpacu dan termotivasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut diperlukan adanya kesamaan persepsi antar pemerintah daerah sebagai penyelenggara pembangunan dengan masyarakatnya. Hal ini tentunya akan tercapai apabila ada komunikasi timbal balik yang baik antara keduanya.

Melihat betapa pentingnya bidang komunikasi terutama untuk menyampaikan informasi, maka oleh setiap negara di dunia pembangunan bidang komunikasi mendapatkan porsi yang lebih besar. Begitu juga di Negara kita Indonesia.

Komunikasi sangat memiliki peran penting dalam proses pembangunan khususnya bagi pembangunan di daerah dalam rangka otonomi daerah. Komunikasi antara pemerintah lokal dan masyarakat sangat penting adanya karena pada dasarnya untuk menjalankan atau menyelenggarakan pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan komunikasi pembangunan diperlukan sinergi antara stakeholder yaitu pemerintahan itu sendiri (*state*), sektor swasta (*private sector*) dan masyarakat sipil (*civil society*). Peran komunikasi disini sebagai fasilitator dalam menyatukan beberapa stakeholders tersebut dengan tetap menggunakan prinsip atau konsep *good governance* yaitu demokratis, adil, transparan, *rule of law*, partisipatif dan kemitraan antar pilarnya.

Sebagai sebuah organisasi, pemerintah daerah semakin sadar bahwa informasi adalah suatu sumber daya strategis yang penting dan dapat dikelola seperti halnya sumber daya yang lain. Internet adalah penyalur yang tepat untuk sumber daya tersebut karena memberikan kemudahan memperoleh informasi yang mutakhir dan dapat diakses oleh masyarakat publik.

Gagasan untuk membuat situs pemprov (pemerintah provinsi) adalah suatu terobosan karena menyadari bahwa masyarakat publik memerlukan informasi tentang pemerintah daerah dan tentang daerahnya sendiri yang dapat diakses dengan mudah.

Situs Pemprov Kalimantan Selatan (www.kalselprov.go.id) mempunyai potensi besar untuk dapat dipergunakan sebagai media komunikasi dalam menyampaikan informasi pembangunan terutama kepada masyarakat perkotaan yang sudah mengenal internet.

Dengan adanya situs pemprov juga diharapkan agar terjadi sinergi yang baik antara *stakeholders* yang ada dan diharapkan masyarakat dapat menggunakan secara optimal.

Munculnya situs pemprov ini menimbulkan pertanyaan baru lagi, yaitu

apakah situs pemprov tersebut telah dimanfaatkan dengan optimal oleh masyarakat, apakah ada usaha atau peranan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dalam mengoptimalkan situs pemprov ini agar tidak sia-sia atau sebaliknya hanya sebagai wacana saja agar pemerintah terlihat demokratis dan transparan dalam bekerja dan apakah program yang telah mereka lakukan tersebut dapat mendukung pelayanan publik yang lebih baik di pemerintahan provinsi Kalimantan Selatan.

Situs Pemprov Kalsel dibuat sejak tahun 1999 dan sudah mengalami beberapa kali pergantian. Situs yang ada saat ini didesain oleh pihak ketiga yang ada di Bandung dan pihak KPDE (Kantor Pengelolaan Data Elektronik) sebagai penyalur informasi yang mengirimkan file-file untuk pengisian data pada situs tersebut. Sedangkan sebelumnya situs pemprov tersebut dikerjakan sendiri oleh pihak KPDE, tapi mempunyai kelemahan pada *security* sehingga dapat dikacaukan oleh para *hacker* dan *cracker*.

Pihak KPDE sendiri sebagai bidang pengelolaan data elektronik yang ada di Pemprov Kalsel hanya mempunyai sedikit pegawai mempunyai pendidikan formal di bidang komputer. Ini adalah salah satu penyebab untuk desain situs tersebut dilimpahkan ke pihak ketiga.

Situs pemprov sebagai suatu sumber daya tentunya mempunyai masalah yang masih menjadi kendala antara lain data yang ada di situs pemprov kurang *up to date*. Permasalahan lain yaitu ada beberapa file yang masih kosong. Sebagian artikel yang dimuat kurang mendapat perhatian karena tidak disajikan dengan menarik.

Berdasarkan beberapa permasalahan di atas maka peneliti tertarik mengangkat judul “Manajemen Situs Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan”.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut didapat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen situs Pemprov Kalimantan Selatan ?
2. Bagaimana penilaian pengguna terhadap keberadaan situs pemprov Kalimantan Selatan ?
3. Apa saja faktor penghambat dalam manajemen situs pemprov Kalimantan Selatan ?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian terhadap situs pemerintah provinsi, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen situs pemprov Kalimantan selatan.
2. Untuk mengetahui penilaian pengguna terhadap keberadaan situs pemprov Kalimantan Selatan
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam manajemen situs pemprov.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

Secara Teoritis

1. Diharapkan dapat memperkaya wawasan dalam penerapan teori-teori yang telah dipelajari selama kuliah
 2. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan dibidang situs pemerintah dan e-government
- Secara Praktis
3. Memberikan masukan terhadap Bidang Pengolahan Data Elektronik (PDE) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan khususnya mengenai pelayanan publik melalui informasi pembangunan.
 4. Sebagai bahan studi atau literatur bagi peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian lebih lanjut, khususnya mengenai situs pemerintah provinsi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode kualitatif menurut Bogda dan Taylor dalam Moleong (2005),

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat di amati. Informasi dan data yang diperoleh peneliti di lapangan seperti data tentang pegawai yang mengelola situs pemprov, biaya yang dianggarkan pemprov untuk pengelolaan situs akan disusun dan dikembangkan berdasarkan teori-teori yang pernah didapat.

Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukannya angka-angka. Hal ini karena adanya penerapan kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti (Moleong, 2005). Penelitian ini dititik beratkan pada hal-hal yang berhubungan dengan manajemen, penilaian pengguna, dan faktor penghambat dalam manajemen situs pemprov Kalimantan Selatan

Sumber Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2005), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Informan kunci dalam penelitian ini adalah :

1. Bapak Noor Hidayat Sultan
Sebagai Kepala Bidang PDE yang mempunyai wewenang dalam manajemen kinerja Bidang PDE dan situs Pemrov Kalsel
2. Bapak Dian Arifia
Sebagai Pranata Komputer Bidang PDE yang mempunyai pendidikan formal pada bidang teknologi informasi
3. Masyarakat
 - a) Yuli Awaliyah
Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
 - b) Ibu Zakiah Dauli

Ibu rumah tangga yang berasal dari Kalimantan Selatan sekarang tinggal di Victoria, Australia.

- c) Luthfie Effendie
Pengamat WEB yang bekerja di Staff IT dan Technical Support Operation AJB.Bumiputera.1912
- d) Bapak Ahmad Furqan Noor
Wiraswasta pengusaha rumah makan Indonesia di Copenhagen Denmark
- e) Robby Cahyantu, S.Hut
Mahasiswa S2 Magister Perencanaan Kebijakan Publik (MPKP) Fakultas Ekonomi UI

Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang diperlukan peneliti memerlukan beberapa teknik. Teknik yang dipergunakan dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh / dikumpulkan dari :

- a. Observasi
Teknik observasi digunakan untuk mengamati berbagai kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini Bidang Pengolahan Data Elektronik (PDE) baik secara langsung maupun tidak langsung atau secara formal maupun informal. Hal ini dilakukan agar kevalidan data baik sekunder serta data primer yang diperoleh dari wawancara dengan informan
- b. Interview / Wawancara
Pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab, wawancara secara langsung dengan maupun tidak langsung melalui email dengan para informan kunci yang tidak bisa ditemui secara langsung karena berada di luar daerah yang terkait dengan penulisan penelitian ini.

Sedangkan data sekunder diperoleh / dikumpulkan dari :

- a. Dokumentasi
Mengumpulkan data seperti data kepegawaian melalui arsip-arsip yang dimiliki oleh Bidang Pengelolaan Data

Elektronik Provinsi Kalimantan Selatan yang berhubungan dengan penelitian.

Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan analisis data kualitatif dengan prosedur, reduksi data, penyajian data. Menurut Miles dan Huberman (1992) ditarik kesimpulan atau verifikasi sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lokasi penelitian yaitu Bidang Pengelolaan Data Elektronik serta wawancara dengan masyarakat dan swasta dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci, laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

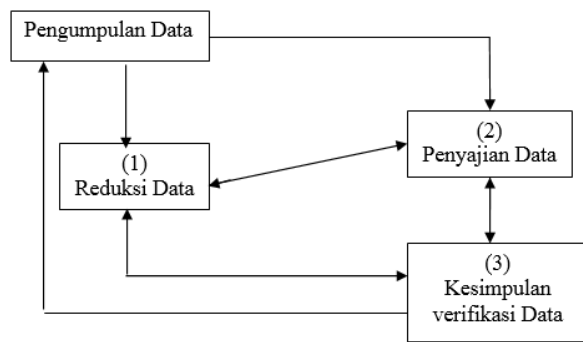
2. Penyajian Data

Penyajian atau display data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Data yang disajikan yaitu tentang manajemen situs pemprov, pihak-pihak yang memanfaatkan keberadaan situs pemprov, penilaian pengguna terhadap keberadaan situs pemprov dan faktor penghambat dalam optimalisasi situs pemprov.

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi dilakukan secara terus-menerus sepanjang proses penelitian berlangsung yaitu sejak awal membuka situs pemprov dengan memasuki lokasi penelitian yaitu Bidang Pengelolaan Data Elektronik Pemprov Kalsel dan selama proses pengumpulan data. Komponen-komponen analisa data tersebut di atas menurut Miles dan Huberman (1992) dapat disimpulkan :

Komponen-komponen Analisis Data



Gsmbar 1. komponen Analisa Data Miles dan Hubermen

Sumber: (Miles dan Huberman, 1992)

HASIL DAN PEMBAHASAN Manajemen Situs Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Manajemen situs web pemerintah akan lebih baik dan lebih lugas jika terdapat keterpaduan antara penerbitan eletronik dengan unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, yang materinya disajikan melalui situs web bersangkutan. Di dalam strategi penyelenggaraan situs web, penting untuk memastikan bahwa berbagai tugas manajemen yang diperlukan bagi pengelolaan situs web yang efektif telah teridentifikasi, dan tanggung jawab pelaksanaan terlah teralokasi serta dipahami dengan jelas oleh para pengelola.

1. Koordinasi pengelola

Koordinasi pengelola yang meliputi antara lain tugas pengelolaan arsitektur informasi secara menyeluruh, perencanaan dan penilaian kemampuan pemakaian (usability), perencanaan isi, yang dapat membantu pengembangan pengalaman pengguna situs web yang memenuhi tujuan pembuatan situs web. Isi minimal pada setiap situs web pemerintah antara lain adalah selang pandang, pemerintah daerah

a) Selang Pandang

Menjelaskan secara singkat tentang keberadaan pemerintah daerah bersangkutan (sejarah, motto

daerah, lambang dan arti lambang, lokasi dalam bentuk peta, visi dan misi)

b) Pemerintah Daerah

Menjelaskan struktur organisasi yang ada di Pemerintah Daerah bersangkutan (eksekutif, legislatif) beserta nama, alamat, telepon, e-mail dari pejabat daerah, jika memungkinkan biodata dari Pimpinan Daerah ditampilkan agar masyarakat luas mengetahuinya,

c) Geografi

Menjelaskan antara lain tentang keadaan topografi, demografi, cuaca dan iklim, sosial dan ekonomi, budaya dari daerah bersangkutan. Semua data dalam bentuk numeris atau statistic harus mencantumkan nama instansi dari sumber datanya.

d) Peta Wilayah dan Sumberdaya

Menyajikan batas administrasi wilayah dalam bentuk peta wilayah (sebaiknya peta referensi yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional – Bokusurtanal, atau instansi pemerintah lainnya yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembuat peta), dan juga sumberdaya yang dimiliki oleh daerah bersangkutan dalam bentuk peta sumberdaya yang dapat digunakan untuk keperluan para pengguna.

e) Peraturan/Kebijakan Daerah

Menjelaskan Peraturan Daerah (Perda) yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah bersangkutan. Melalui situs webpemerintah daerah inilah semua Perda yang telah dikeluarkan dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas.

f) Buku Tamu

Tempat untuk menerima masukan dari pengguna situs web pemerintah daerah bersangkutan.

Pada situs pemerintah provinsi Kalimantan Selatan sudah memenuhi isi minimal ada setiap situs web

pemerintah daerah yaitu adanya selayang pandang, pemerintahan daerah, geografi, peta wilayah dan sumberdaya, peraturan /kebijakan daerah dan buku tamu.

Peta situs yang merupakan spesifikasi desain situs pada situs Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

- a) Depan, adalah homepage dari situs www.kalselprov.go.id
- b) Selayang pandang yang berisi sejarah Kalimantan Selatan , sejarah pemerintahan, arti lambang, letak geografis, flora dan fauna, hidrologi, topografi, dan iklim.
- c) Pemerintahan yang berisi letak administrative, visi dan misi, muspida, eksekutif, badan, dinas, kantor, kabupaten/kota, dan kecamatan/desa.
- d) Pembangunan yang berisi pertanian, kehutanan, pemukiman dan prasarana wilayah, perikanan dan kelautan, peternakan, tenaga kerja dan transmigrasi, perkebunan, pertambangan, pendaatan daerah, perhubungan, perindustrian dan perdagangan, kesehatan, koperasi dan UKM serta pariwisata.
- e) Data pokok yang berisi pendidikan, kesehatan, keagaamaan, pemilu dan DPRD, keuangan daerah, pos dan telekomunikasi, angkutan darat, laut an udara, media cetak dan radio, produk domestic bruto, dan pendapatan regional.
- f) Potensi daerah yang berisi kehutanan, perikanan dan kelautan, peternakan , perkebunan, pertambangan , pertanian, perhubungan, perindustrianm dan perdagangan serta pariwisata.
- g) Investasi yang berisi rencana investasi, investasi yang mennjol, realisasi investasi, PMDN dan PMA, perluasan PMDN dan PMA, laporan/LPKM, evaluasi penanaman modal, direktori

perusahaan serta hokum dan regulasi.

- h) Arsip berita yang memuat seluruh berita yang ada di situs pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
 - i) Forum merupakan ajang diskusi bagi pengguna yang telah mendaftarkan diri pada situs pemerintah provinsi Kalimantan Selatan.
 - j) Buku Tamu berisi komentar-komentar tentang situs dan masukan bagi pemerintah Kalimantan Selatan.
 - k) Galeri Foto berisi foto-foto para pejabat pemerintahan provinsi Kalimantan Selatan.
 - l) Pengumuman Lelang berisi pengumuman lelang yang ada di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan.
 - m) Dokumentasi yang berisi undang-undang, surat keputusan, surat edaran, peraturan daerah, peraturan pemerintahan pusat dan data.
 - n) Webmail berisi layanan e-mail bagi pengguna yang telah terdaftar pada situs pemerintahan provinsi Kalimantan Selatan.
 - o) Kontak berisi tentang alamat, e-mail, telepon dan faximile Kantor Pengelolaan data Elektronik.
2. Pengadaan dan Manajemen Pemasok
- Pengadaan dan manajemen Pemasok, termasuk penetapan tender, pemilihan dan manajemen tingkat layanan pemasok, penetapan panitia tender, kejelasan mengenai hak-hak kekayaan intelektual, pemantauan dan control kualitas para kontraktor, serta waktu penyerahan. Kegiatan tersebut adalah kegiatan proyek dimana proyek dapat diartikan sebagai sederetan aktifitas yang diarahkan pada suatu hasil dimana jangka waktu penyelesaian ditentukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengeloaan Data Elektronik yaitu Bapak Drs. Noor Hidayat Sultan, beliau mengatakan bahwa : “Kami pernah mendapat

kritikan lewat surat kabar lokal seharusnya Kantor Pengelolaan Data elektronik mentenderkan pengelolaan situs. Biasanya pengadaan atau pengelolaan suatu proyek bisa ditenderkan kalau dananya lebih dari 50 juta rupiah, sedangkan dana untuk pengelolaan situs masih di bawah 50 juta rupiah. Infrastruktur sendiri banyak menggunakan barang-barang yang ada. Jadi baik untuk pengadaan infrastruktur sendiri banyak menggunakan barang-barang yang ada. Jadi baik untuk pengadaan infrastruktur maupun pengelolaan situs tidak kami tenderkan.” (Wawancara, 13 Agustus 2008)

3. Membangun tim dan hubungan dengan organisasi

Pemilik situs kalselprov.go.id adalah pemerintah provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan penanggung jawabnya adalah kepala badan Informasi Daerah baru setelah itu Kepala Bidang Pengelolaan data Elektronik sebagai manajer situs pemerintah provinsi.

Manajer Situs (Ketua Pengelola Situs Web) pada Situs Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Bapak Drs. Noor Hidayat Sultan, bertanggungjawab secara operasional atas situs web pemerintah daerah sehingga dengan demikian yang bersangkutan akan memimpin tim situs. Situs pemerintah provinsi Kalimantan Selatan untuk desain tampilan dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh pihak ketiga yaitu Fadya Kreasindo.

4. Promosi Situs Web

Mengenalkan Situs tersebut ke berbagai komunitas yang berhubungan. Mendaftarkan ke *Search Engine* dunia maupun Indonesia untuk menangkap pengguna yang melakukan pencarian dan penjelajahan lewat *search engine* tersebut. Contoh *search engine* dunia seperti google.com, yahoo.com, altavista.com, sedangkan *search engine* Indonesia seperti searchindonesia.com,

catcha.com,. Daftarkan diri ke milis komunitas, dan mengusahakan situs tersebut menjadi isu diskusi di dalam milis komunitas.

Khusus untuk kontak e-mail, hanya alamat email yang mempunyai domain .go.id yang bisa digunakan. Pemakaian alamat generik (seperti ‘manajersitus’, ‘sekda’) lebih diutamakan daripada alamat/nama pribadi, hal tersebut dikaitkan dengan kemungkinan terjadinya perubahan personil pada manajemen situs web pemerintah daerah. Pada situs pemerintah provinsi Kalimantan Selatan alamat email yang digunakan adalah kpde@kalselprov.go.id. Penanggung jawab situs web harus memastikan bahwa semua e-mail ke alamat-alamat yang dituju dijawab dengan segera, seperti halnya komunikasi fisik atau komunikasi elektronik lainnya dengan instansi pemerintah daerah setempat.

Penilaian Pengguna Terhadap Keberadaan Situs Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam sebuah situs yaitu wartaekonomi.com yang mengadakan ajang pemberian penilaian atas penerapan teknologi informasi (TI) di instansi pemerintahan menyebutkan dasar penilaian mengacu pada tahapan perkembangan *e-Government*. Dalam situs tersebut menjelaskan Penilaian website pemerintahan berdasarkan kriteria :

1. Identitas Lembaga

Berkaitan dengan kemampuan website profil, potensi, dan keunggulan lembaga atau daerah. Menurut pendapat Ibu Zakiah Dauli (Pengguna situs) situs pemerintah provinsi Kalimantan Selatan infonya masih belum lengkap, masih terlalu banyak kekurangan. Masih belum bisa dikatakan menjual Kalimantan Selatan dimata nasional dan internasional dalam segala bidang terutama pariwisatanya dan juga masih belum bisa dikatakan penuh sebagai media komunikasi.

2. Desain Website

Menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan tampilan website dan sistem menu yang dipergunakan. Pendapat Bapak Luthfie Effendie (ahli IT) mengamati WEBnya menurut beliau sudah bagus warna juga elegant. Mengenai tampilan itu relatif bagi setiap user. Sepanjang tidak mengganggu inti utamanya yakni menyampaikan informasi yang lengkap dan cepat.

3. Isi Website

Terdiri dari Content serta produk atau jasa yang ditawarkan oleh pemerintah daerah. Menurut Bapak Robby Cahyanto (Pengguna situs) beropini perlu penambahan data laporan realisasi belanja daerah untuk transparansi. Berita yang berkaitan dengan provinsi Kalimantan Selatan sudah bagus hanya kurang *up to date*, isi harus banyak yang diperbaharui bahkan masih banyak yang kosong diantara *directory* perusahaan dan pendapatan daerah. Tapi masih dapat dimaklumi karena dalam pembuatan suatu website dilakukan secara bertahap

4. Fasilitas Web

Yaitu *searching, security, costumer service and support, contact information*, dan *investor information*. Menurut Yuli Awaliyah (Pengguna situs) berpendapat banyak data yang belum lengkap pada situs pemerintah provinsi Kalimantan Selatan seperti investasi yang menonjol belum ada isinya, padahal data tersebut bisa menjadi umpan para investor untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Selatan.

5. Fitur Website

Berkaitan dengan kemampuan website untuk diatur tampilannya dan memiliki kegunaan sesuai dengan kebutuhan spesifik individu tertentu.

Menurut Bapak Ahmad Furqan Noor (pengguna situs) beropini perlu penambahan fitur-fitur yang menarik seperti gambar, peta dan bisa

berhubungan langsung dengan pejabat yang bersangkutan. Pada situs pemerintah provinsi Kalimantan Selatan juga tidak mempunyai menu multibahasa.

6. Uji Respons

Merupakan respon langsung dari pengunjung website daerah tersebut. Pengunjung akan melakukan penilaian terhadap website mengenai tampilan, isi website tersebut, kemudahan dan kecepatan mengakses, keamanan, dan sebagainya. Menurut Luqman (pengguna situs) Situs pemerintah provinsi Kalimantan Selatan tidak dilengkapi polling pendapat dari pengunjung situs, padahal polling ini bisa dijadikan masukan bagi Kantor Pengelolaan Data Elektronik tentang kepuasan pengunjung di situs www.kalselprov.go.id

Penilaian pengunjung terhadap keberadaan situs pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan kurang baik, banyak masukan-masukan yang menginginkan situs pemerintah provinsi Kalimantan Selatan bisa lebih baik lagi mengingat dibandingkan dengan situs pemerintah provinsi lain, situs pemerintah provinsi Kalimantan Selatan masih banyak perlu perbaikan. Prospek situs pemerintah provinsi Kalimantan Selatan cukup bagus asal dikelola dengan baik dan melibatkan 3 sektor yaitu masyarakat, swasta dan pemerintah.

Kendala Dalam Manajemen Situs Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

1. Terbatasnya SDM

Pegawai yang ada di Kantor Pengelolaan Data Elektronik masih kurang terutama yang menguasai komputer. Yaitu hanya ada 1 pegawai yang mempunyai pendidikan dibidang computer.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dian Arifia, S.Kom (Pranata Komputer) Kantor pengelolaan data Elektronik mempunyai 1 orang eselon III dan 3

orang eselon IV. Eselon IV seharusnya memiliki 3 bawahan, tetapi bawahan dari Eselon IV pada Kantor Pengelolaan Data Elektronik masih kurang atau malah tidak mempunyai anak buah.

2. *Hardware* (Perangkat Keras) dan *Software* (Perangkat Lunak) yang kurang memadai.

Keterbatasan pemerintah untuk menyediakan tempat akses gratis bagi masyarakat menjadi hambatan dalam penyediaan pelayanan *e-Government* secara optimal. Terbatasnya infrastruktur juga berhubungan dengan terbatasnya anggaran pemerintah. Selain itu menurut Bapak Dian Arifia, S.Kom (Pranata Komputer) hardware seperti komputer di Kantor Pengelolaan Data Elektronik masih kurang mencukupi, sebagai kantor yang menyediakan informasi bagi pemerintah provinsi Kalimantan Selatan harusnya ada komputer yang bisa digunakan untuk membuka internet oleh pegawai dari badan lain di lingkungan pemerintah provinsi atau masyarakat yang bisa menggunakan internet gratis. Kantor Pengelola Data Elektronik sudah seharusnya mempunyai software yang original (asli) dan lengkap, tapi karena anggaran sedikit beberapa software yang ada merupakan software bajakan.

3. Keterbatasan biaya pengelolaan

Untuk pembuatan situs, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan mengalokasikan dana sebesar 49.900.000 rupiah. Menurut Bapak Noor Hidayat Sultan (Kepala Bidang Pengelolaan Data Elektronik) anggaran dana yang ada membuat tim pengelola situs pemerintah provinsi Kalimantan Selatan dituntut lebih bijaksana dalam menggunakannya, ini juga menjadi salah satu alasan tim pengelola situs memilih bekerjasama dengan Fadya Kreasindo yang menawarkan harga sesuai dengan anggaran dana situs

Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan.

Instansi lain yang kurang bekerjasama dalam memberikan data kebanyakan data yang ada pada situs pemerintah provinsi Kalimantan Selatan tidak langsung diambil dari instansi yang bersangkutan tetapi diambil dari laporan tahunan BPS atau dari Bappeda. Sering pegawai bidang Pengelolaan Data Elektronik “jemput bola” mendatangi instansi untuk mengambil data. Seharusnya instansi-instansi di pemerintahan Kalimantan Selatan lebih aktif mengirimkan/menerima data terbaru mereka untuk dipublikasikan secara online melalui situs pemerintah provinsi Kalimantan Selatan.

Setelah menganalisa berbagai kendala-kendala yang dihadapi dalam manajemen situs pemerintah provinsi Kalimantan Selatan di Kantor Pengelolaan data Elektronik, adapun upaya-upaya atau strategi untuk mengatasi kendala tersebut, yakni sebagai berikut

- a. Meningkatkan kemampuan SDM pada Kantor Pengelolaan Data Elektronik diarahkan kepada fasilitas penataan sistem kerja, standarisasi keahlian dan pengembangan profesi dari pekerja atau jabatan struktural dan fungsional.
- b. Peningkatan pemanfaatan dan pengembangan sarana teknik, media penyiaran, media baru, tradisional dan publikasi untuk pemerataan informasi.
- c. Menambah sumber dana untuk pelaksanaan manajemen situs pemerintah provinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari APBD provinsi Kalimantan Selatan, sehingga manajemen situs pemerintah provinsi dapat dikerjakan secara optimal, sesuai target, *up-date*, efektif, dan efisien.
- d. Meningkatkan koordinasi antara instansi pemerintah, non pemerintah dan lembaga masyarakat dalam layanan informasi.

KESIMPULAN

Dengan memperhatikan permasalahan yang ada serta didasarkan pada hasil analisa data dan penelitian di lapangan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Manajemen situs pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan Kantor Pengendalian Data Elektronik sudah cukup baik. Manajemen situs sudah melalui tahap-tahap seperti koordinasi pengelola, spesifikasi teknis, membangun tim dan hubungannya dengan organisasi, bantuan *online* dan promosi situs. Namun untuk pengadaan infrastruktur maupun pengelolaan situs tidak menggunakan pemasok (tidak ditenderkan) dan pihak Kantor Pengelolaan Data Elektronik menggunakan pihak ketiga (pihak swasta) untuk desain situs.
- 2) Penilaian pengguna terhadap keberadaan situs pemerintah provinsi Kalimantan Selatan cukup baik dan cukup optimis kedepannya situs pemerintah provinsi mempunyai prospek dengan manajemen yang baik dan benar. Namun masih perlu diperhatikan seperti *update* data, menu multibahasa dan file-file yang masih kosong.
- 3) Kendala-kendala yang dihadapi Kantor Pengelolaan Data Elektronik dalam manajemen situs pemerintah provinsi Kalimantan Selatan antara lain jumlah pegawai yang mempunyai pendidikan dibidang komputer hanya 1 orang dari 9 pegawai yang bekerja di KPDE, *Hardware* dan *Software* yang kurang memadai, keterbatasan biaya pengelolaan, dan instansi lain yang kurang bekerjasama dalam memberikan data.

Saran-saran

- 1) Menambah pegawai terutama yang menguasai komputer dan mempunyai pendidikan di bidang komputer. Sehingga nantinya diharapkan dalam

manajemen terutama desain dapat dibuat oleh pihak Kantor Pengelolaan Data Elektronik sendiri.

- 2) Meningkatkan pengetahuan pegawai yang ada mengenai ilmu komputer terutama yang berhubungan dengan situs seperti desain situs, teknik *hacking* dan *security* seperti mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- 3) Menambah *hardware* (perangkat keras) *software* (perangkat lunak) sesuai dengan keperluan situs dan sesuai dengan anggaran manajemen situs pemerintah provinsi Kalimantan Selatan sehingga manajemen situs dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.
- 4) Memanfaatkan seoptimal mungkin hardware dan software yang ada di Kantor Pengelolaan Data.
- 5) Menambah sumber dana untuk pelaksanaan manajemen situs pemerintah provinsi Kalimantan Selatan yang berasal dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga manajemen situs pemerintah provinsi dapat dikerjakan secara optimal, sesuai target, *up-date*, efektif dan efisien.
- 6) Mensosialisasikan situs pemerintah provinsi terlebih dahulu kepada instansi di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan.
- 7) Melakukan koordinasi serta meningkatkan kerjasama dengan instansi lain di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Selatan. diharapkan ada kerjasama dari organisasi pemerintahan untuk memastikan adanya keterpaduan proses-proses online sehingga bisa menciptakan situs pemerintah yang *up-date*, lengkap dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewanto, I. Joko. 2006. *Web Desain*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Handoko, T. Hani. 2003. *Manajemen*. BPFE. Yogyakarta.
- Hariduanasyah, Akhmad Fakhrizal. 2005. *Implementasi Electronic*

- Government (E-Government) di wilayah kota Banjarmasin*. Fisip Unlam, Banjarmasin
- Miles, M.B & Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohadi. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moleong, Lexy Johannes. 2005. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Remaja. Rosdakarya. Bandung
- Siska, Dewi. 2006. “Peranan PT. Telkom dan Pemerintah Daerah Guna Membangun *Electronic Government (e-Gov)* dibidang telekomunikasi Dalam Menunjnag Komunikasi Pembangunan di Kota Banjarmasin”. FISIP Unlam, Banjarmasin.
- Rianto, Budi & Lestari, Tri. 2012. *Polri & Aplikasi E-Government*, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya